



**PERSEPSI MAHASISWA FISIP UNDIP
TERHADAP
KEBIJAKAN REMUNERASI**

LAPORAN HASIL PENELITIAN

Oleh:

**Dra.Rina Martini, M.Si
Drs. Yuwanto, M.Si, Ph.D**

**DIBIYAI OLEH DANA DIPA FISIP UNDIP
TAHUN ANGGARAN 2010**

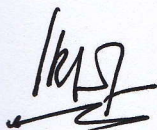
**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO
2010**

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : Persepsi Mahasiswa FISIP UNDIP Terhadap Kebijakan Remunerasi
2. Bidang Ilmu : Sosial
3. Ketua Peneliti :
 - a. Nama Lengkap dan Gelar : Dra. Rina Martini, M.Si
 - b. Golongan Pangkat dan NIP : III C/ 196703131993032001
 - c. Jabatan Fungsional : Lektor
 - d. Fakultas / Jurusan : ISIP / Ilmu Pemerintahan
4. Alamat Ketua Peneliti :
 - a. Alamat Kantor : Jl. Prof. Soedarto, Tembalang, Semarang
 - b. Alamat Rumah : Jl. Kunci No.9B RT 06 RW 05 Banyumanik, Semarang 50264
5. Jumlah Anggota Peneliti :
 - a. Nama Anggota Peneliti : Drs. Yuwanto, M.Si, Ph.D
6. Lokasi Penelitian : Kampus FISIP UNDIP Tembalang
7. Lama Penelitian : 3 (tiga) bulan [Mei-Juli 2010]
8. Biaya Yang Diperlukan : Rp.6.500.000,00
9. Sumber Dana : DIPA UNDIP dari Sumber Dana PNB FISIP Tahun Anggaran 2010

Semarang, 29 Juli 2010

Ketua Peneliti,



Dra. Rina Martini, M.Si
NIP. 196703131993032001

Mengetahui,
Pejabat Pembuat Komitmen,
Pembantu Dekan II
FISIP UNDIP



Drs. Agus Hermani DS, MM
NIP. 19570807 198511 1 001



HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

LAPORAN PENELITIAN

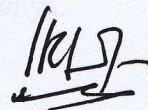
Yang bertandatangan di bawah ini saya :

Nama : Dra. Rina Martini, M.Si

NIP : 19670313 199303 2 001

Menyatakan bahwa laporan penelitian ini yang berjudul Persepsi Mahasiswa FISIP UNDIP Terhadap Kebijakan Remunerasi adalah hasil karya saya sendiri yang belum pernah ada sebelumnya. Karya ini adalah milik saya, karena itu pertanggungjawabannya sepenuhnya berada di tangan saya.

Penulis,



Dra. Rina Martini, M.Si

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas Berkah dan Rahmat-NYA, Laporan Penelitian bisa selesai pada waktunya.

Penelitian tentang Persepsi Mahasiswa FISIP UNDIP Terhadap Kebijakan Remunerasi ini terwujud berawal dari keprihatinan penulis akan situasi dan kondisi bangsa ini yang sudah mencanangkan gerakan reformasi birokrasi sejak tahun 1999 tetapi belum juga membuahkan hasil. Dan kebijakan remunerasi ini diambil oleh pemerintah dalam rangka memperlancar proses reformasi birokrasi. Penelitian ini melihat dari sisi persepsi mahasiswa terhadap kebijakan tersebut.

Penulis sadar bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu masukan dan kritik membangun akan sangat penulis butuhkan demi sempurnanya tulisan ini.

Terima kasih kepada Dekan dan para Pembantu Dekan di lingkungan FISIP UNDIP Semarang yang telah bersedia memperhatikan aktifitas dosen-dosennya dengan mengalokasikan dana DIPA untuk kegiatan penelitian.

Akhir kata, semoga penelitian ini bisa bermanfaat bagi pembacanya.

Semarang, Juli 2010

Penulis

ABSTRACT

In practice, Indonesian bureaucracy still showed poor achievements. Some surveys on it depicted that its performance still poor in terms of service quality, responsivity, responsibility, and accountability. Some efforts to reform the bureaucracy need a continuous and consistent actions. There are three factors which caused the badness of bureaucracy behavior namely political constraint, administrative constraint, and socio-cultural constraint. This research seeks to explore the administrative constraint through the study on the implementation of remuneration policy with its controversy.

This research employs a descriptive method where data collecting processes done by using techniques such as questionnaire, interview guide, and documentation tools. All of 100 respondents were selected from the whole students of FISIP Undip. All of the collected data was analyzed using a qualitative approach.

Based on the problems surveyed and according to research findings, we concluded as follows: most of respondents (56%) aware of remuneration policy and most of them knew it from the television programs; most of respondents (69%) agreed on remuneration policy and the majority of them (61%) believe that remuneration policy will bring a significant change on the improvement of bureaucrats' performance; most of respondents (61%) stated that remuneration policy will sustain based on its capacity to increase the bureaucrats' welfare. The weakness of that policy is a potential corruption since the existing of many Indonesian law loopholes than can be used by the irresponsible parties. Whereas the strenght of that policy laid on its capacity to improve Indonesian civil servants (PNS) through the significant salary raise.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG MASALAH	1
1.2. PERUMUSAN MASALAH	4
1.3. TUJUAN PENELITIAN	4
1.4. KONTRIBUSI PENELITIAN	4
1.5. TINJAUAN PUSTAKA	5
1.6. DEFINISI KONSEP	9
1.7. DEFINISI OPERASIONAL	9
1.8. METODE PENELITIAN	10
BAB II GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN	14
2.1. PROFIL FISIP UNDIP	14
2.2. PROFIL MAHASISWA FISIP UNDIP BERADSAR PADA BAGIAN KEMAHASISWAAN TAHUN 2006-2010	25
BAB III HASIL PENELITIAN	37
3.1. MAKNA REMUNERASI	37
3.2. KESIAPAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH	44
3.3. DISTRIBUSI DAN JAWABAN RESPONDEN	46
BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	55
4.1. PERSEPSI MAHASISWA FISIP UNDIP	55
4.2. KELEMAHAN DAN KELEBIHAN REMUNERASI	61
4.3. SARAN UNTUK KEBERLANJUTAN REMUNERASI	62
BAB V PENUTUP	63
5.1. KESIMPULAN	63
5.2. REKOMENDASI	64
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.	Distribusi Responden Berdasar Jurusan	45
Tabel 3.2.	Distribusi Responden Berdasar Angkatan	45
Tabel 3.3.	Distribusi Responden Berdasar Pekerjaan Orang Tua	46
Tabel 3.4.	Pengetahuan Responden Tentang Remunerasi	47
Tabel 3.5.	Sumber Pengetahuan Responden	47
Tabel 3.6.	Sikap Terhadap Remunerasi	48
Tabel 3.7.	Alasan Responden Menyetujui	48
Tabel 3.8.	Alasan Responden Tidak Menyetujui	49
Tabel 3.9.	Kepercayaan responden Atas Perubahan Kinerja Birokrasi	50
Tabel 3.10.	Keberlanjutan Kebijakan Remunerasi	51